

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Nomor : 000.8.3.4/ 654 /BKAD.1/2026
Tanggal : 5 Januari 2026
Tentang : Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di
Lingkungan Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (20 KLASIFIKASI)
 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)	Jangka Waktu (Dibuka / Ditutup)
1	2	3	4	5
1	Data Identitas Pribadi ASN dan Non ASN BKAD (Digital dan Non Digital)	– UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h – UU No. 43 Tahun 2009 – UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP	Dibuka: Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu. Ditutup: Penyalahgunaan Identitas.	Dibuka: Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan. Ditutup: Tidak Terbatas.
2	Surat Rahasia / Naskah Dinas Rahasia Keuangan dan Aset Daerah	– UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j – UU No. 43 Tahun 2009	Dibuka: Mendukung Kebijakan Pemerintah/Pimpinan. Ditutup: Mengganggu Kebijakan Pemerintah/Pimpinan.	Dibuka: Setelah Kebijakan Ditetapkan / Masa Rahasia Berakhir. Ditutup: Tidak Terbatas / Selama Berstatus Rahasia.

3	Memo / Catatan Internal dan Disposisi Surat Pimpinan BKAD	– UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j – UU No. 43 Tahun 2009	Dibuka: Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan. Ditutup: Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan.	Dibuka: Setelah Kebijakan Ditetapkan. Ditutup: Tidak Terbatas.
4	Kode Akses Elektronik, User Akses / Password Aplikasi Keuangan & Aset (SIPD/FMIS/SIMBMD)	– UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j – UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 25	Dibuka: Melindungi Aplikasi/Sistem Keuangan Daerah dari Penerobosan oleh Pihak Tertentu. Ditutup: Akses Oleh Pihak Tertentu / Risiko Pembobolan Kas Daerah & Data Aset.	Dibuka: Hanya untuk Admin/User Resmi yang Berwenang. Ditutup: Selama Masih Digunakan/Berlaku.
5	Username dan Password Admin Aplikasi, Database Keuangan/BMD, dan Media Sosial BKAD	– UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6 – UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 25	Dibuka: Melindungi Aplikasi/Sistem Dari Penerobosan oleh Pihak Tertentu. Ditutup: Penyalahgunaan Akses Oleh Pihak Tertentu.	Dibuka: Hanya Internal Admin Berwenang. Ditutup: Selama Masih Aktif dan Dibutuhkan.
6	Identitas Individu/Pribadi Admin Aplikasi Keuangan, Sistem Aset, dan Media Sosial BKAD	– UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (3) huruf c & Pasal 17 huruf h	Dibuka: Menjaga Kelancaran Pelaksanaan Tugas Para Admin Secara Profesional. Ditutup: Dapat Mendorong Serangan/Intimidasi Kepada Individu Petugas Admin.	Dibuka: Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan. Ditutup: Tidak Terbatas.

7	Identitas Pelapor Dan Isi Laporan Layanan SP4N Lapor / Pengaduan Masyarakat BKAD	– UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Dibuka: Melindungi Identitas Pribadi Dari Penyalahgunaan Identitas. Ditutup: Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu.	Dibuka: Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan. Ditutup: Tidak Terbatas.
8	Data Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pelanggaran Kinerja/Perilaku Pejabat/Staf BKAD (WBS)	– UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Dibuka: Melindungi Data dari Penyalahgunaan. Ditutup: Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu.	Dibuka: Atas Dasar Surat Permintaan Resmi dan Bersifat Ketat Serta Terbatas. Ditutup: Tidak Terbatas.
9	Draf Naskah Dokumen Perjanjian Kerja Sama Keuangan / Pengelolaan Aset Daerah	– UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 – UU No. 43 Tahun 2009	Dibuka: Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan. Ditutup: Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan.	Dibuka: Selama Belum Ditetapkan / Tanda Tangan Kontrak. Ditutup: Selama Proses Penyusunan Kebijakan.
10	Draf Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan BKAD	– UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j – UU No. 43 Tahun 2009	Dibuka: Rahasia Negara/Daerah dan Mendukung Kebijakan Pemerintah/Pimpinan. Ditutup: Proses Penyusunan Kebijakan, Penyalahgunaan Dokumen oleh Pihak Tertentu.	Dibuka: Setelah Ditetapkan Resmi dan Selesai Diaudit BPK. Ditutup: Selama Belum Ditetapkan dan Belum Diaudit.
11	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) / Realisasi	– UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Dibuka: Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan.	Dibuka: Setelah Periode Pelaporan Selesai / Final Ditetapkan.

	Anggaran Tahun Berjalan (Sebelum Final)		Ditutup: Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan.	Ditutup: Selama Belum Final dan Belum Diaudit.
12	Arsip Dinamis dan Dokumen SPJ Keuangan Daerah Tahun Berjalan	– UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i – UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 3	Dibuka: Melindungi Data dari Penyalahgunaan. Ditutup: Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu.	Dibuka: Setelah Selesai Diverifikasi dan Diaudit Auditor Resmi. Ditutup: Selama Belum Diverifikasi dan Diaudit.
13	Dokumen SKP dan Evaluasi Kinerja Individu ASN BKAD	– UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i – UU No. 20 Tahun 2023 – PP No. 17 Tahun 2020	Dibuka: Melindungi Penilaian Kinerja ASN Dari Penyalahgunaan. Ditutup: Penyalahgunaan Penilaian Kinerja ASN Oleh Pihak Tertentu.	Dibuka: Sampai Ada Izin Pribadi/Perintah Pengadilan. Ditutup: Tidak Terbatas.
14	Dokumen Penilaian Kompetensi (Assessment) ASN BKAD	– UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 – UU No. 20 Tahun 2023 – PP No. 17 Tahun 2020	Dibuka: Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan Manajemen Perencanaan Pegawai. Ditutup: Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan.	Dibuka: Atas Dasar Surat Permintaan Resmi Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas. Ditutup: Tidak Terbatas.
15	Dokumen Usulan Promosi, Mutasi, dan Rotasi Pegawai di Lingkungan BKAD	– UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 – UU No. 20 Tahun 2023	Dibuka: Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan.	Dibuka: Setelah Ditetapkan, Atas Dasar Surat Permintaan Bersifat Ketat dan Terbatas.

			Ditutup: Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan.	Ditutup: Selama Proses Pengusulan Berlangsung.
16	Dokumen Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian ASN / Non ASN BKAD	– UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 – UU No. 20 Tahun 2023 – PP No. 17 Tahun 2020	Dibuka: Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan. Ditutup: Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan.	Dibuka: Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas. Ditutup: Selama Belum Resmi Ditetapkan.
17	Dokumen Pelantikan / SK Jabatan ASN BKAD (Draf & Berkas Pertimbangan)	– UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 – UU No. 20 Tahun 2023 – PP No. 17 Tahun 2020	Dibuka: Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan. Ditutup: Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan.	Dibuka: Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas. Ditutup: Selama Proses Penetapan Berlangsung.
18	Rincian Data Gaji, Potongan Piutang, dan Tunjangan Pegawai BKAD (Individu)	– UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 – PP No. 5 Tahun 2024	Dibuka: Melindungi Data Finansial Pribadi dari Penyalahgunaan. Ditutup: Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu.	Dibuka: Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan. Ditutup: Tidak Terbatas.
19	Data Cuti ASN dan Non ASN BKAD	– UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 – UU No. 20 Tahun 2023	Dibuka: Melindungi Data Pribadi Pegawai dari Penyalahgunaan. Ditutup: Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu.	Dibuka: Atas Izin Pegawai / Kebutuhan Kedinasan Resmi. Ditutup: Tidak Terbatas.

		– PP No. 17 Tahun 2020		
20	Draf Dokumen Inventarisasi, Legalitas, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	– UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 – UU No. 43 Tahun 2009 Pasal 44 ayat (1) huruf i	Dibuka: Melindungi Data Aset Daerah dari Penyalahgunaan/Sengketa Pihak Ketiga. Ditutup: Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu.	Dibuka: Setelah Ditetapkan, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas. Ditutup: Selama Proses Penyusunan/Legalitas Berlangsung.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 5 Januari 2026

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



MUHAMAD SALEH, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720309 199903 1 008